

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan berawal dari tahap perencanaan yang menjadi landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wirosari,
Tahap ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun Renja Kecamatan Wirosari;
 - b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Kecamatan Wirosari;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Kecamatan Wirosari.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Wirosari.
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Wirosari dan mengevaluasi capaian Renja Kecamatan Wirosari tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Wirosari.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Wirosari, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Lintas Sektoral.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Wirosari.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Wirosari.
Tahap ini dilakukan dalam rangka mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Kecamatan Wirosari disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana kerja dan pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Wirosari.
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Wirosari Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 590);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wirosari disusun sebagai dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Wirosari.

- Tujuan

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wirosari disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2024 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 4 program dan 9 kegiatan serta 21 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perenc dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Musrenbang Kecamatan)
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya;
 - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan bahan logistic kantor;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Sub Kegiatan penyediaan bahan/material;
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah.

- 1) Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 1) Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - 2) Sub Kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah.
- 1) Sub Kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bintek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- 1) Sub Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Nilai IKM	83,88	14.229.707.043	85	4.743.235.681	82,7	4.743.235.681	88,75	4.743.235.681	107%	86,16%	82,8	4.743.235.681	99%	27,62%	
Sasaran-1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat			Nilai IKM	83,88	14.229.707.043	85	4.743.235.681	82,7	4.743.235.681	88,75	4.743.235.681	107%	86,16%	82,8	4.743.235.681	99%	27,62%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai	73,5	13.046.618.473	66	1.466.369.942	66	2.504.975.000	66	2.180.561.332	100%		66	3.646.931.274	90%	27,95%	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		100	27.965.000	100	-	100		100%		100	27.965.000	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1		1	27.965.000	1	-	1		100%		1	27.965.000	100%		Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1		1		1	-	1		100%		1	-	100%		Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen	1		1		1	-	1		100%		1	-	100%		Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	dokumen	1		1		1	-	1		100%		1	-	100%		Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1		1		1	-	1		100%		1	-	100%		Subbag Keuangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	1		1		1	-	1		100%		1	-	100%		Subbag Keuangan

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3.289.588.281	100	3.289.588.281	100	3.289.588.281	100	3.289.588.281	100%		100	3.289.588.281	100%	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	3.810.171.000	14	3.810.171.000	14	3.810.171.000	14	3.810.171.000	100%		14	3.810.171.000	100%	100%	Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	20.040.000	12	20.040.000	12	20.040.000	12	20.040.000	100%		0	20.040.000	0%		Subbag Keuangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	79.760.000	100	79.760.000	100	79.760.000	100	79.760.000	100%		100	79.760.000	100%	100%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	48	47.250.000	48	47.250.000	48	47.250.000	48	47.250.000	100%		48	47.250.000	100%	100%	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	25	32.510.000	25	32.510.000	25	32.510.000	25	32.510.000	100%		25	32.510.000	100%		Subbag Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	421.367.000	100	421.367.000	100	421.367.000	100	421.367.000	100%		100	421.367.000	100%	100%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	unit	35	15.677.000	35	15.677.000	35	15.677.000	35	15.677.000	100%		30	15.677.000	86%	100%	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	5	107.920.000	5	107.920.000	5	107.920.000	5	107.920.000	100%		0	107.920.000	100%	100%	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	unit	20	61.000.000	20	61.000.000	20	61.000.000	20	61.000.000	100%		20	61.000.000	100%	100%	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	unit	10	29.446.000	10	29.446.000	10	29.446.000	10	29.446.000	100%		10	29.446.000	100%	100%	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	unit	12	6.300.000	12	6.300.000	12	6.300.000	12	6.300.000	100%		12	6.300.000	100%	100%	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan/Material	unit	20	68.332.000	20	68.332.000	20	68.332.000	20	68.332.000	100%		20	68.332.000	100%	100%	Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	23	87.000.000	12	87.000.000	12	87.000.000	12	87.000.000	100%		12	87.000.000	90%	43,97 %	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	661.194.400	100	661.194.400	100	661.194.400	100	661.194.400	100%		100	661.194.400	100%	59,18 %	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	6	60.640.000	6	60.640.000	6	60.640.000	6	60.640.000	100%		6	60.640.000	100%	36,39 %	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	600.554.400	1	600.554.400	1	600.554.400	1	600.554.400	100%		1	600.554.400	100%	35,13 %	Subbag Umum dan Kepegawaian
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100	705.881.600	100	705.881.600	100	705.881.600	100	705.881.600	100%		100	705.881.600	100%		
		7.01.03.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keg	100	705.881.600	100	705.881.600	100	705.881.600	100	705.881.600	100%		100	705.881.600	100%		
		7.01.03.2.01.02 subkegiatan pembangunan sarana dan prsarana kelurahan	kelurahan	2	670..131.800	2	670..131.800	2	670..131.800	2	670..131.800	100%		0	670..131.800	0%		Seksi Tapem
		7.01.03.2.01.03 Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelurahan	2	35.749.800	2	35.749.800	2	35.749.800	2	35.749.800	100%		0	35.749.800	0%		Seksi Tapem
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kegiatan	1	32.510.000	1	32.510.000	1	32.510.000	1	32.510.000	0%		1	32.510.000	0%	0%	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bulan	1	-	1	-	1	-	1	-	100%		1	-	0%	0%	Trantib
		7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	0	-	0	-	0	-	0	-	100%		0	-	0%		Trantib
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		105	27.400.000	100	27.400.000	100	27.400.000	100	27.400.000	100%		100	27.400.000	100%	100%	

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	orang	105	27.400.000	105	27.400.000	105	27.400.000	105	27.400.000	100%		100	27.400.000	100%	100%	Tapem
		7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kelurahan	2	27.400.000	2	27.400.000	2	27.400.000	2	27.400.000	100%		14	27.400.000	100%	100%	Tapem

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wirosari

Sesuai dengan Keputusan Camat Wirosari nomor tahun 2022 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wirosari	B	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,70)	B (79,70)	B (85,00)	BB (88,75)	BB (88,76)	BB (88,77)
2	Nilai Sakip Kecamatan Wirosari	B	B (65,00)	B (68,00)	BB (70,00)	BB (72,00)	BB (73,50)	B	B	B (82,70)	B (82,99)

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2021 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*)..

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 - 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP

Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobo t	Nilai tahun 2019	Nilai tahun 2020
A	Perencanaan Kinerja	30	20,62	21,00
B	Pengukuran Kinerja	25	16,57	16,62
C	Pelaporan Kinerja	15	9,36	9,52
D	Evaluasi Internal	10	6,06	6,16
E	Capaian Kinerja	20	8,26	9,11
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,87	62,41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sedangkan untuk kecamatan Wirosari bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran kecamatan Wirosari telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;

- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented government*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan
- 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.

- b. Nilai /skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi objek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,7 sementara realisasinya sebesar 88,75 melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas

pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan

- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kradenan Kecamatan Kradenan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kradenan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Keterampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes

Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
 - b. Kurangnya personil menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
 - c. Perlunya integrasi system dan data.
 - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).
 - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
3. Isu terkait pelayanan publik.
 - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh(komprehensif) di semua unit pelayanan.
 - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adalah Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Wirosari
Kab.Grobogan

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2024		Hasil Analisis Kebutuhan 2024	
					Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
						Rp		Rp
1		2	3	4	5	6	7	8
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	100%	20.648.000	100%	20.648.000
	1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	20.648.000	100	20.648.000
		Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	kegiatan	1	20.648.000	1	20.648.000
	1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	3.054.178.974	100	3.054.178.974
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	3.054.178.974	14	3.054.178.974
	1. 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	129.812.800	100	129.812.800
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	48	66.312.800	48	66.312.800
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	25	-	25	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	25	63.500.000	25	63.500.000
	1. 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	440.517.600	100	440.517.600
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	35	16.000.0000	35	16.000.0000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	6	121.945.600	6	121.945.600
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	bulan	12	61.000.000	20	61.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	bulan	12	28.392.000	12	28.392.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	bulan	12	6.300.000	12	6.300.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	bulan	12	86.350.000	12	86.350.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	120.530.000	12	120.530.000

	1. 5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	304.859.800	100	304.859.800
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan	12	1.500.000	12	1.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	44.076.800	12	44.076.800
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	259.283.000	12	259.283.000
	1. 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	315.469.484	100	315.469.484
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	12	64.000.000	12	64.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	251.469.484	1	251.469.484
2		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	100	697.656.000	100	697.656.000
	2. 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat	Keg	100	697.656.000	100	697.656.000
		7.01.03.2.02 Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	2	597.900.000	2	597.900.000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		2	99.756.000	2	99.756.000
3		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	orang	70	27.317.000	70	27.317.000
	3. 1	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	orang	70	27.317.000	70	27.317.000
		7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	70	27.317.000	70	27.317.000
4		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi		100	55.000.000	100	55.000.000
	4. 1	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	55.000.000	100	55.000.000
		7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kelurahan	2	55.000.000	2	55.000.000
						5.615.440.800		5.615.440.800

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang menjadi Acuan/Pedoman

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024 yaitu: **“Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi”**. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaransasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat.
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care).
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana.

- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada.
- 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima.
- 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.
- 10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN.

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,34 tahun
		Rata-rata lama Sekolah	7,04 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,14 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Madya (0,6375 – 0,7724)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	87,22%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	92,34%
		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	76,07 %
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B (0,20- 0,44)
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks 80,10
		Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,15

		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks 62,75
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks 46,00
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks 0,68
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,23 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,5 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	1,59 %/tahun
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	1,47 persen
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	870,467 Milyar Rupiah
9	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks 0,70
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,4 %/tahun
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,2 %
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori B (77,70)
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Sangat Inovatif
13	Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks 3,3
	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Nilai B (70)

	akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan		
		Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
		Opini BPK	Opini WTP
		Indeks sistem merit	Kategori III (250)
13	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	73,85 %
14	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	100%
		Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	100%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wirosari

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Wirosari dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Wirosari Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Wirosari tahun 2024 adalah :

“ Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ”

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kecamatan Wirosari dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kecamatan Wirosari tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasara n	Indikat or	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai B (77,70)
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP (Penilaian tim Kabupaten)	BB (70)

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Wirosari akan melaksanakan 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7) Pemeliharaan Mebel
- 8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 9) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)
- b.** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c.** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b.) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 8) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Wirosari tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2023 dan Prakiraan Maju 2024
Kecamatan Wirosari

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targe t	Rp	targe t	Rp
KECAMATAN WIROSARI							2.979.744.000		5.615.440.800
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat		Nilai IKM			82,99		83,29	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	68	2.832.744.000	70	9.133.687.200
			Laporan Keuangan Sesuai SAP		%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		%	100		100	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko		%	40		60	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	100	-	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun			1	-	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun			1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun			1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun			1		1	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun			1		1	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun			1		1	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	1.906.544.000	100	2.015.619.200
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		bulan	14	3.054.178.974		3.054.178.974

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		bulan	12	-	12	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	12	-	12	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun			12	-	12	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun		dokumen	12	-	12	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen	12	-	12	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi dalam aplikasi (SIM Aset) dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	%	100	-	100	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun		dokumen	10	-	10	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan		unit	111	-	111	-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		orang	14	-	14	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	52.000.000	100	14.500.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan		stel	30	-	30	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel	30	22.000.000	30	14.500.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	30	-	30	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	30	30.000.000	30	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	241.700.000	100	236.057.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		unit	35	8.000.000	35	7.215.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		unit	10	-	10	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		unit	10	-	10	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		unit	20	80.000.000	20	79.140.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		unit	10	14.500.000	10	13.690.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		unit	12	13.200.000	12	12.600.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		unit	20	40.000.000	20	38.472.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali	40	86.000.000	40	84.940.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan		unit				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	100	226.000.000	100	6.562.981.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
				Daerah dalam 1 tahun dikali 100					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		unit		40.000.000		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		unit				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	10	75.000.000	10	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		unit	10	36.000.000	10	62.981.000
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		unit	10	-	10	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan		unit		-		-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		unit	1	-	1	6.500.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	1	75.000.000	1	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	1	-	1	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi	%	100	169.500.000	100	161.661.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targe t	Rp	targe t	Rp
				Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan	12	76.000.000	12	72.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan	12	18.500.000	12	18.500.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan	12	10.000.000	12	7.692.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan	12	65.000.000	12	63.469.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	237.000.000	100	142.869.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		unit	6	22.000.000	6	21.891.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		unit	50	-	50	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara		unit	12	15.000.000	12	11.778.000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara		unit	12	-	12	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1	200.000.000	1	109.200.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1	-	1	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1	-	1	-
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada	%	100	44.000.000	100	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targe t	Rp	targe t	Rp
				di kecamatan dikali 100					
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100	%	100	26.000.000	100	40.000.000
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan		Kali	1	26.000.000	1	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan dan dapat dilaksanakan dibagi jumlah urusan yang dilimpahkan ke kecamatan dikali 100	%	100	-		-
		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)		Dok	12			
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah indikator SPM yang didata		Indikator	12			
		7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM		Dok	12			
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah yang dilimpahkan dikali 100	%	100	18.000.000	100	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan		Jenis	1	18.000.000	1	-
		7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan		Jenis	1	-	1	-
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan			1	-	1	-
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dikali 100	Persen	100	20.000.000	100	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targe t	Rp	targe t	Rp
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dikali 100	Keg	100	20.000.000	100	20.000.000
		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes		Desa	14	-	14	-
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)			14	20.000.000	14	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dikali 100	lembaga	14	-	14	-
		7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas		orang	14	-	14	-
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif	persen	100	22.000.000	100	8.768.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100	persen	100	22.000.000	100	8.768.000
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam		Kegiatan	1	12.000.000	1	-
		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB		Kegiatan	1	10.000.000	1	8.768.000
		7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	kegiatan	1	-	1	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
				Kepala Daerah yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dikali 100					
		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum		kegiatan	1	-	1	-
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan	12	21.000.000	12	20.050.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan	12	21.000.000	12	20.050.000
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		kegiatan	1	21.000.000	1	20.050.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang	70	-	70	-
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100		100	40.000.000	100	29.150.000
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100	%	100	40.000.000	100	29.150.000
		7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kegiatan	1	20.000.000	1	9.050.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Desa	14	20.000.000	14	20.100.000
		7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Desa	14	-	14	-
		7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa	14	-	14	-
		7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Desa	14	-	14	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina		BPD	14	-	14	-
		7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya		Lembaga	14	-	14	-
		7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)		Desa	14	-	14	-
		7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan	14	-	14	-

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Wirosari Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Wirosari tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wirosari Tahun 2023 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2024 Renja Kecamatan Wirosari terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 9.251.655.200 (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wirosari Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan

tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

CAMAT WIROSARI

Drs, KURNIA SANIADI, M.Si
NIP. 197407011993021001